

BAB I

PENDAHULUAN

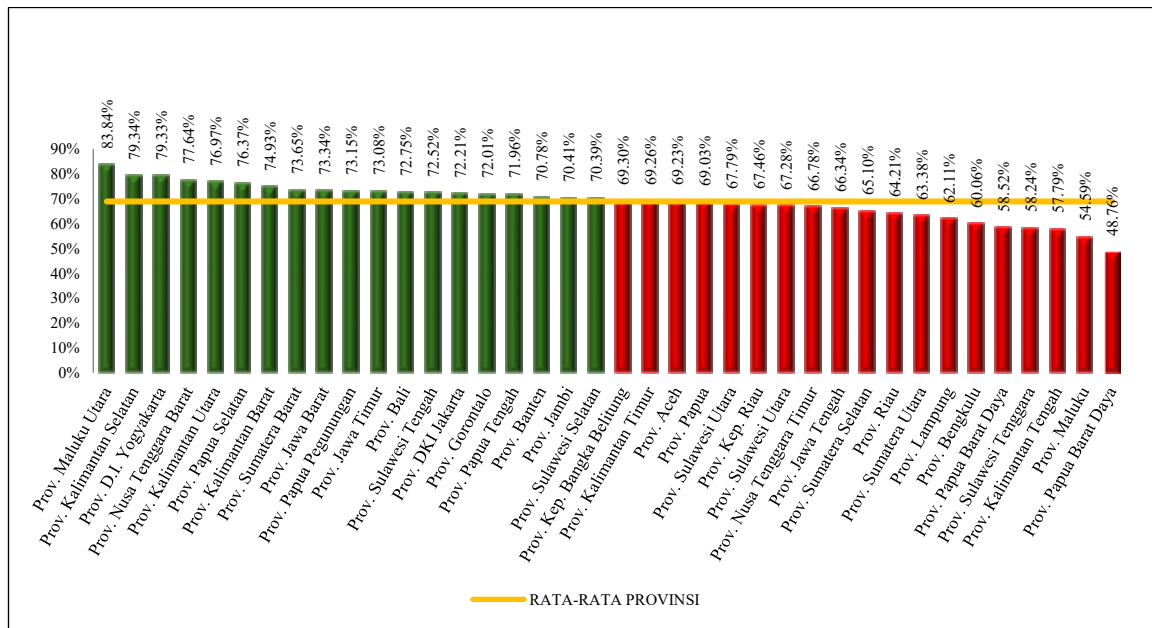
1.1 Latar Belakang

Era desentralisasi fiskal berlangsung sejak era reformasi dan membawakan sebuah perubahan fundamental dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan pada pemerintah daerah agar mengelola keuangannya secara mandiri, mengubah sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Menurut Mardiasmo (2021, p. 16), desentralisasi menawarkan dua manfaat utama. Pertama, kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan serta memupuk kreativitas melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal. Kedua, desentralisasi membuat alokasi sumber daya menjadi lebih efisien karena pengambilan keputusan dilakukan dalam tingkatan pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat. Hasilnya pembangunan daerah pun semakin pesat dan kondisi keuangan pemerintah daerah pun membaik sehingga kinerja keuangan dapat terkelola secara optimal (Riza & Zuripal, 2023).

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator yang penting dalam mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola entitasnya, dimana pemerintah daerah diberi mandat supaya dapat mengatur serta mengelola keuangan masing-masing daerah (Pertiwi *et al.*, 2024). Kinerja keuangan yang optimal dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, realisasi

Belanja Modal untuk infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di daerah (Febriani *et al.*, 2023). Pengukuran kinerja keuangan yang akurat menjadi instrumen vital dalam menilai keberhasilan desentralisasi, di mana diberikan mandat untuk dapat mengatur serta mengelola anggaran daerah masing-masing.

Pengelolaan keuangan di Indonesia pada kenyataannya menunjukkan permasalahan yang kompleks sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang belum optimal, bahkan dapat menyebabkan ketimpangan antar daerah dan berbagai permasalahan struktural lainnya (Meilinda *et al.*, 2023). Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, masih banyak Provinsi di Indonesia yang menunjukkan realisasi pendapatan yang sangat lemah sehingga sangat bergantung dalam memenuhi harapan untuk membiayai pembangunan daerah, yang mengakibatkan rendahnya kinerja keuangan dari pemerintah daerah terkait penyediaan layanan publik (Akbar, 2025). Sehingga itu menunjukkan pemberian kewenangan desentralisasi menjadi tantangan bagi berbagai daerah untuk selalu berusaha mencapai realisasi pendapatan masing-masing agar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya.

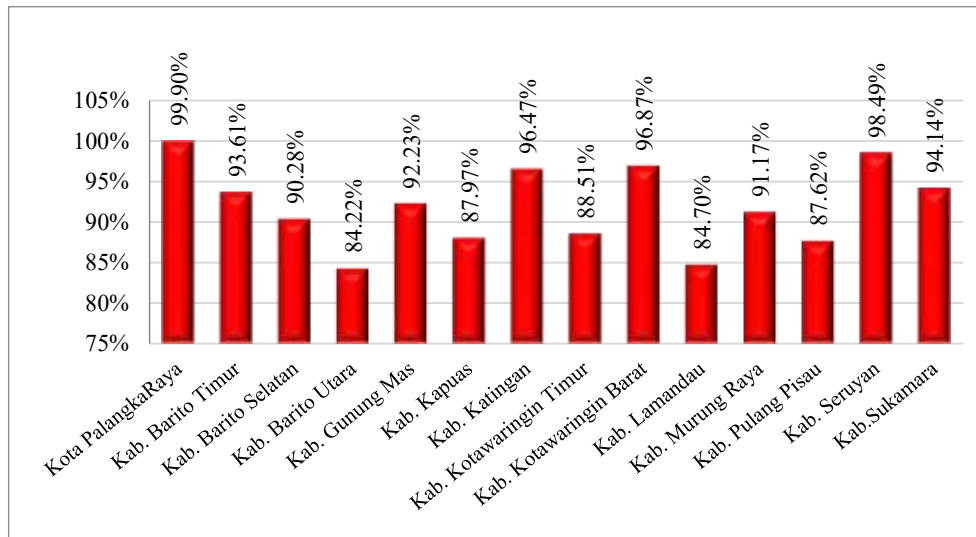


Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan APBD 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2025)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa 19 provinsi di Indonesia memiliki realisasi pendapatan APBD sampai akhir kuartal III tahun 2025 di bawah rata-rata nasional yaitu 70,01%. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dari 19 provinsi yang menghasilkan realisasi APBD terendah pada tahun 2025 terdapat provinsi yang kapasitas fiskalnya lemah yaitu Kalimantan Tengah, Aceh, dan wilayah Papua (Technoz, 2026). Kalimantan Tengah menghasilkan realisasi pendapatan terendah ketiga pada tahun 2025 yaitu 57,79%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Menurut Badan Pusat Statistik (2025) Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153.443,91 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2025 relatif kecil yaitu 2.844.990 jiwa yang

menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas di Indonesia, sehingga banyak sekali permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. 2 Rata- Rata Kinerja Keuangan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024

Sumber : Lampiran 2

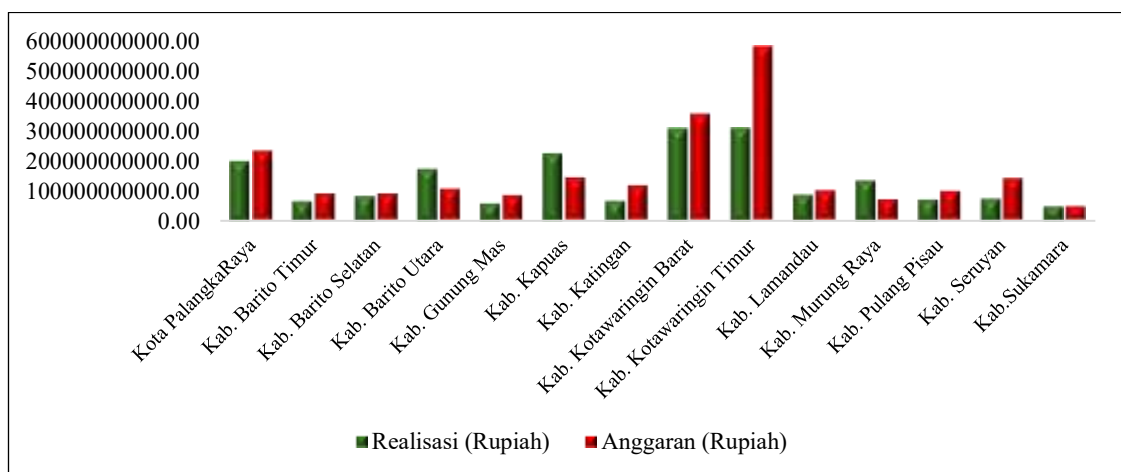
Berdasarkan Gambar 1.2, rata-rata dari kinerja keuangannya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah periode 2020–2024 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah berada dalam kondisi tidak efisien, karena nilai rasio efisiensi keuangan banyak yang berada di atas 90%. Rasio efisiensi ini dipergunakan dalam menilai kinerja keuangannya daerah, dimana bila persentasenya lebih tinggi akan menunjukkan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah (Rizkita & Suhartini, 2025). Berdasarkan data, daerah dengan tingkat ketidakefisienan tertinggi antara lain Kota Palangka Raya sebesar 99,90%, Kabupaten Seruyan sebesar 98,49%, serta Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 96,87%. Kabupaten Katingan (96,47%), Sukamara (94,14%), dan Barito Timur (93,61%) juga

menunjukkan kondisi tidak efisien karena berada di atas ambang batas 90%. Daerah seperti Kabupaten Barito Utara (84,22%), Lamandau (84,70%), Kapuas (87,97%), dan Kotawaringin Timur (88,51%) relatif cukup efisien karena berada di bawah 90%, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kinerja keuangan antar kota/kabupaten, dimana sebagian besar daerah masih menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan secara efisien. Analisis secara lebih mendalam diperlukan dalam mengkaji beragam faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti ketergantungan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

Menurut Rahayu & Hendaris (2025) ketergantungan pemerintah daerah muncul selaku dampak dari dominasi sumber daya eksternal, dimana akan mengurangi kapabilitas daerah untuk mengelola keuangannya dengan mandiri dan berdampak negatif untuk kinerja keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari Kota dan Kabupaten di Kalimantan Tengah tahun 2024, di mana PAD hanya sebesar 35,17% sementara pendapatan transfer mencapai 64,88% (Pratama, 2025). Ketergantungan keuangan yang tinggi ini mencerminkan situasi di mana kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah betul-betul bergantung kepada dukungan keuangan pemerintah pusat untuk membiayai operasional dan kegiatan pemerintahan mereka. Ketergantungan yang tinggi tentunya dapat berdampak negatif terhadap upaya daerah untuk meminimalkan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan daerah untuk rentang panjang. Sehingga tingginya ketergantungan

keuangan daerah berpotensi melemahkan kinerja keuangan dari pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

Faktor kedua yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai sumber keuangan yang asalnya melalui pengelolaan daerah, semisal pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah dan bersifat sebagai kekayaan daerah (Ramahdani & Trisnarningsih, 2022). Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan dalam meningkatkan kemandirian setiap wilayah agar lebih mudah mengambil keputusan secara mandiri. PAD tinggi akan mempengaruhi kinerja keuangan secara positif jika realisasi PAD mampu diatas anggaran yang telah ditetapkan.



Gambar 1. 3 Realisasi dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan gambar 1.3, menunjukkan realisasi dan anggaran PAD kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah di tahun 2024. Beberapa daerah dengan

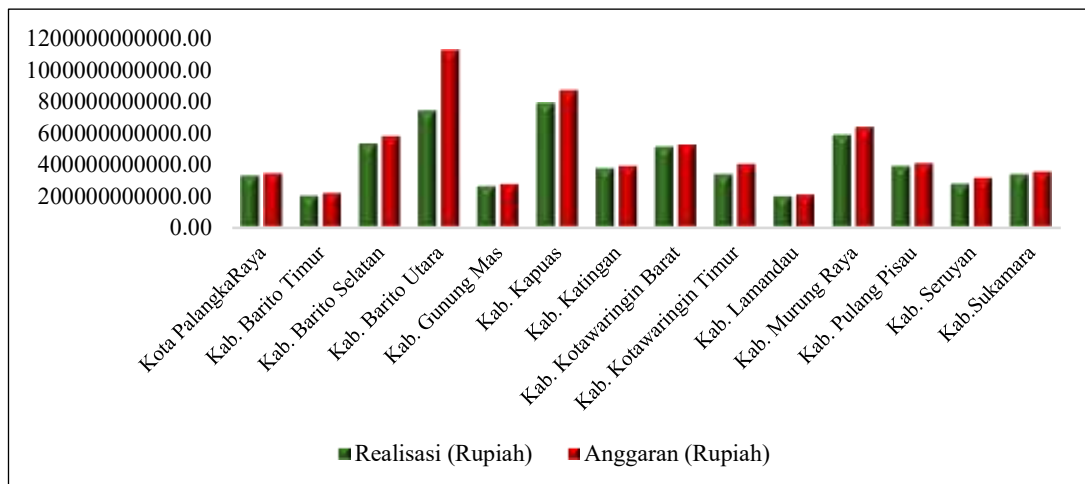
tingkat realisasi 100% adalah Kabupaten Barito Utara, yang mencapai realisasi sekitar Rp173.449.441.610,37 dari anggaran Rp106.220.941.447,00, atau 163% lalu diikuti oleh Kabupaten Kapuas dengan realisasi sekitar Rp224.955.110.974,98, yang melebihi target sebesar Rp143.868.092.700,00, atau 156%. Berbanding terbalik, Kabupaten Katingan hanya mencapai 58% dengan realisasi sebesar Rp68.168.667.171,46 dari jumlah Rp117.959.495.534,00. Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan hanya mencapai 53%, dengan Kotawaringin Timur merealisasikan Rp 310.048.714, 182,06 dari anggaran sebesar Rp585.143.313.400,00 dan Seruyan merealisasikan Rp75.395.125.019,20 dari anggaran sebesar Rp141.612.984.053,00. Realisasi PAD kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah masih banyak yang belum sesuai target anggaran ini tentunya dapat berdampak pada pada pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan sumber daya keuangannya sendiri dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Faktor ketiga adalah belanja modal, sebagai pengorbanan yang dilaksanakan guna mendapatkan aktiva tetap yang mampu memberikan manfaat melebihi satu tahun dan bermanfaat bagi suatu daerah karena memberikan hasil jangka panjang yang terus ditingkatkan (Ratnasari & Meirini, 2022). Belanja Modal termasuk sebagai kegiatan yang dalam jangka panjang mampu menambah kekayaan daerah melalui pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan (Padang & Padang, 2023). Pengelolaan Belanja Modal tidak hanya memperhatikan besaran anggaran, tetapi ketepatan dalam penyerapan yang

tergambar

dari

realisasi.



Gambar 1. 4 Realisasi dan Anggaran Belanja Modal Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan gambar 1.4, menunjukkan realisasi dan anggaran dari Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah tahun 2024. Kota Palangka Raya merupakan daerah yang realisasi tertinggi yaitu 95,98% pada tahun 2024 dengan anggaran Rp341.769.840.717,00 dan merealisasikan Rp327.997.382.474,45. Kabupaten Barito Utara, meskipun memiliki anggaran Rp1.122.948.776.629,00, hanya merealisasikan Rp740.681.963.383,47 atau sebesar 65,96%, yang menunjukkan perbedaan signifikan. Perbedaan ini mencerminkan faktor-faktor seperti efisiensi anggaran, penundaan proyek, atau perubahan prioritas pembangunan. Ketidakefektifan pemanfaatan anggaran ini mempengaruhi kinerja keuangan daerah, yang berdampak pada rendahnya penyerapan dana untuk pembangunan, terutama dalam infrastruktur, kesehatan, pendidikan, listrik, dan jaringan yang masih menjadi permasalahan di Kalimantan Tengah.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji dampak ketergantungan keuangan daerah, PAD, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan dengan hasil yang beragam. Pada aspek ketergantungan keuangan, Rahayu & Hendaris (2025) di Jawa Barat menemukan pengaruh negatif, sementara Safitri *et al.* (2023) di Sumatera Selatan menemukan pengaruh positif. Yudiastuti *et al.* (2025) di Bali menyatakan positif, sedangkan Niswani (2022) di Aceh dan Ratnasari & Meirini (2022) di Jawa Timur menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap kinerja keuangan. Pada aspek Belanja Modal, hasil penelitian terbagi menjadi tiga kategori: Mahendra *et al.* (2025) di Kabupaten Bantaeng menemukan pengaruh positif, Mulia & Widiatmoko (2025) di Jawa Tengah menemukan pengaruh negatif, sedangkan Insani *et al.* (2023) di Jambi dan Padang & Padang (2023) di Sumatera Utara menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian diselenggarakan di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai karakteristik wilayah berbeda dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah sangat besar namun penduduknya relatif sedikit, sehingga menghadapi tantangan geografis, demografis, dan fiskal yang khas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi yang dialami Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tentunya berpotensi memengaruhi kinerja keuangan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya dilakukan pada daerah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan infrastruktur yang relatif mapan, sementara karakteristik wilayah dengan sebaran penduduk yang tidak merata seperti Kalimantan Tengah belum banyak dikaji secara spesifik. Penelitian ini menggambarkan bagaimana kinerja

keuangan pemerintah daerah dalam konteks wilayah yang memiliki karakteristik tersebut. Penelitian ini menggunakan pengamatan dengan periode dari tahun 2020 sampai 2024 yang meliputi masa pandemi *COVID-19* serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Penelitian ini menggunakan teori agensi dan *stewardship*. Urgensi dan kontribusi penelitian ini adalah untuk memahami serta memberikan wawasan mengenai kinerja keuangan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal, khususnya pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai latar belakang yang sebelumnya dijabarkan, peneliti berminat melaksanakan penelitian untuk memahami “Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Tengah”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari paparan latar belakang sebelumnya, terbentuklah sejumlah rumusan masalah berupa:

1. Apakah Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah dijabarkan, bisa dijelaskan tujuannya penelitian ini yakni:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Menguji dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
3. Menguji dan menganalisis Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil yang didapat bisa diterapkan sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan akademisi bidang akuntansi mengenai dampak Ketergantungan Keuangan Daerah, PAD, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian juga menyajikan wawasan terkait penggunaan teori agensi dan *stewardship* dalam menjelaskan hubungan diantara Ketergantungan Keuangan Daerah, PAD, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini mampu menyajikan informasi sekaligus pemahaman kepada penulis tentang pengaruh Ketergantungan Pemerintah Daerah, PAD, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

Penelitian ini menyajikan penilaian komprehensif terhadap kinerja keuangan daerah yang bisa dijadikan landasan untuk menyusun strategi guna meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pemanfaatan dana transfer kepada pemerintah pusat, peningkatan alokasi dan efektivitas Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur daerah, serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan dan lebih transparan.